

# PROFIL MITRA INKLUSI SIGAB

Memperkuat Inklusi Sosial untuk Kestaraan dan Hak-hak Penyandang Disabilitas



## Tentang SIGAB-INKLUSI

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (**SIGAB Indonesia**) adalah mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) INKLUSI yang berkomitmen memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Sebagai Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), SIGAB membangun masyarakat yang inklusif dan adil melalui pendekatan struktural dan lokal. Melalui Program INKLUSI, SIGAB menjalankan program *Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights* (SOLIDER), yang berfokus meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan inklusif, pemulihan ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Program ini juga berupaya memberdayakan aktor-aktor penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman serta penerimaan sosial terhadap inklusi disabilitas. Melalui kolaborasi, advokasi, dan pemberdayaan, SIGAB berusaha memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan kesempatan yang setara dalam pembangunan.

## Wilayah Kerja

SIGAB-INKLUSI berkolaborasi dengan 4 OMS mitra lokal di 6 provinsi, yaitu Bengkulu (Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusi/PMMI), Jawa Barat (Forum Komunikasi penyandang disabilitas Cirebon/FKDC), Jawa Timur (Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo/PPDiS), dan NTT (Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi/Garamin), D.I. Yogyakarta (SIGAB), dan Kalimantan Timur (SIGAB).





## Tujuan Program



Mewujudkan inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas



Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19



Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di Indonesia



## Fokus Program

SIGAB berfokus pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan inklusi sosial pada:

### Peningkatan Aksesibilitas



Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan publik bagi penyandang disabilitas

### Pemulihan Ekonomi



Pemulihan ekonomi dan peningkatan akses ketenagakerjaan yang inklusif

### Peningkatan Partisipasi



Peningkatan partisipasi yang inklusif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan



## Strategi Program

SIGAB-INKLUSI memiliki 4 strategi kunci, yaitu:



**Mendorong Rintisan Desa Inklusif (RINDI)** agar pemerintah desa dan masyarakat memiliki pemahaman dan penerimaan yang baik terhadap penyandang disabilitas, termasuk terbukanya ruang partisipasi, kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, dan aksesibilitas layanan publik.



**Penguatan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dan Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK)** sebagai wadah untuk mendukung aspirasi penyandang disabilitas dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.



**Mendorong pembentukan kebijakan inklusif** yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta inklusi sosial.



**Penguatan Media untuk Advokasi** untuk meningkatkan pemberitaan dan dukungan terkait kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).



## Hasil yang Diharapkan

Terwujudnya Desa-Desa Inklusi yang ramah penyandang disabilitas, dengan akses mudah ke fasilitas umum, kebijakan yang inklusif, dan pendataan penyandang disabilitas yang akurat.

KDD dan KDK memiliki kelembagaan yang kuat dan berfungsi efektif sebagai wadah advokasi hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang.

Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan berfungsi optimal menyediakan asesmen, informasi, pelatihan, dan pengawasan untuk memastikan akses penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

## Kegiatan



Kegiatan pertemuan KDD di Desa Oben, Kupang NTT untuk mendorong aspirasi dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam forum pengambilan keputusan desa. Foto: Sekretariat INKLUSI

### Peningkatan Layanan Kependudukan dan Identitas Hukum

Meningkatkan layanan kependudukan dan identitas hukum bagi penyandang disabilitas dengan mengunjungi langsung tempat tinggal mereka untuk memfasilitasi pembuatan dokumen. SIGAB juga mendukung pendataan berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) di desa/kelurahan, dengan mendorong inisiatif 'Satu Data Penyandang Disabilitas' untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial dan mempermudah distribusi yang tepat sasaran.

### Pengorganisasian dan Penguatan Kelompok Penyandang Disabilitas melalui KDD dan KDK

Membentuk KDD dan KDK sebagai ruang aman untuk berbagi aspirasi, memperjuangkan hak, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Kelompok ini juga berperan dalam advokasi pembangunan inklusif dan memperkuat kapasitas anggotanya melalui pelatihan paralegal bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum, untuk mempromosikan akses keadilan hukum bagi penyandang disabilitas. KDD/KDK yang kuat menjadi wadah advokasi dan pendampingan hukum yang efektif bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi masalah hukum dan pemenuhan hak.

### Meningkatkan Keterampilan Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas

Mendukung pemulihan mata pencaharian bagi usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, termasuk memfasilitasi akses ke program pengembangan usaha dan pendanaan pemerintah, pelatihan manajemen usaha, dan dukungan untuk mengakses pasar. SIGAB juga melakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan untuk membantu penyandang disabilitas mengembangkan keterampilan usaha yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

### Kampanye dan Edukasi Publik

SIGAB menggunakan Solider.id dan Solider TV sebagai kanal pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu inklusi disabilitas.

### Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Penguatan ULD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berfungsi secara optimal dalam melakukan asesmen, menyediakan informasi, penguatan kapasitas, dan pengawasan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. ULD berperan sebagai penghubung antara penyandang disabilitas pencari kerja dan pengusaha, serta memfasilitasi akses ke pelatihan dan peluang kerja. Selain itu, SIGAB juga mendorong ULD untuk bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan pelatihan vokasi dan lembaga penyalur tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan menghubungkan penyandang disabilitas dengan peluang pekerjaan.

### Mendukung Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Forum Pengambilan Keputusan

Mendukung keterlibatan dalam forum pengambilan keputusan, seperti Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa agar suara penyandang disabilitas didengar dalam pembangunan desa. SIGAB juga mendorong adanya Musrenbang Tematik penyandang disabilitas serta penganggaran yang inklusif dalam proses pembuatan kebijakan desa yang mendukung inklusi disabilitas.

SIGAB juga menginisiasi Temu Inklusi (sejak 2014), forum nasional setiap dua tahun sekali yang menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak penyandang disabilitas.

### Advokasi Desa Inklusi dan Kebijakan Inklusif

SIGAB mengadvokasi kebijakan inklusif yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas layanan publik. SIGAB juga aktif dalam aliansi nasional seperti FORMASI Disabilitas, yang memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas sejak 2021. Selain itu, SIGAB mendorong pengembangan Desa Inklusi, bekerja sama dengan mitra program SOLIDER di tingkat lokal dan nasional untuk menciptakan desa yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

## Capaian



Kegiatan Temu Inklusi Nasional ke-5 bertema "Berdaya dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif 2030," diinisiasi oleh SIGAB dan dilaksanakan di Situbondo. Acara ini dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari pemerintah, organisasi disabilitas, dan mitra pembangunan lainnya.  
Foto: SIGAB

Selama Program INKLUSI berlangsung sampai dengan Juli 2024, SIGAB telah memiliki capaian sebagai berikut

 **> 2.000**

penyandang disabilitas dan orang marginal lainnya telah mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya.

 **> 600**

penyandang disabilitas dan orang marginal lainnya telah menerima pengembangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam forum atau proses pengambilan keputusan publik.

 **> 2.000**

penyandang disabilitas dan orang marginal lainnya telah berpartisipasi dalam proses atau forum pengambilan keputusan publik.

### Pengembangan Kelompok Komunitas:

Membangun **62 KDD/KDK** di desa/kelurahan untuk mendukung penyandang disabilitas.

### Kolaborasi dan Mekanisme Rujukan:

- Bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk membangun mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
- Kerja sama dengan rumah layanan sosial/panti dan Puskesmas untuk perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan sosial.

### Pemberdayaan dan Partisipasi:

- Melibatkan > 200 penyandang disabilitas dalam penyusunan peraturan desa.
- Memberdayakan penyandang disabilitas dalam penguatan kapasitas pemberdayaan politik.
- > 1900 anggota kelompok penyandang disabilitas menerima layanan identitas hukum, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelatihan keterampilan.

### Kebijakan Inklusif:

Mendorong kebijakan inklusif di tingkat daerah, termasuk Rancangan Aksi Daerah-Penyandang Disabilitas (RAD-PD), Perda, Peraturan Bupati, SE, dan ULD Ketenagakerjaan. Contohnya RAD-PD di NTT, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan DIY.

### Penguatan ULD:

Membentuk dan mengoptimalkan ULD di berbagai wilayah, termasuk Ambon, Maros, Lombok, Situbondo, Probolinggo, Kupang, Rote Ndao, Balikpapan, Samarinda, Kulon Progo, dan Sleman.

### Kemitraan untuk Kesempatan Kerja:

Bekerja dengan swasta dan universitas, seperti PT Alfamart, PT Adira Finance, H&M, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) untuk membuka kesempatan kerja dan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.

### Pemantauan Partisipasi Pemilu:

Menyampaikan hasil pemantauan partisipasi kelompok penyandang disabilitas dan marginal kepada pihak penyelenggara pemilu agar lebih inklusif.

## NO-ONE IS LEFT BEHIND

*Tidak Ada Satupun yang Tertinggal*

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, atau INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 5 tahun (dengan anggaran mencapai A\$75 juta sepanjang 2021-2026) dengan kemungkinan perpanjangan 3 tahun hingga A\$45 juta (2026-2029). Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten, dan >800 desa di Indonesia.

### KONTAK

 [info@inklusi.or.id](mailto:info@inklusi.or.id)

 [www.inklusi.or.id](http://www.inklusi.or.id)

